

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Informasi laporan keuangan perusahaan sangat dibutuhkan oleh para investor dan pengguna eksternal lainnya (Gati, 2015). Namun laporan keuangan dapat menghasilkan risiko salah saji yang akan menyesatkan pembaca. Risiko informasi tersebut muncul karena adanya kurangnya informasi yang disampaikan oleh penyedia informasi serta transaksi yang sering dilakukan menyebabkan transaksi terkadang menjadi error. Cara untuk mengurangi risiko informasi tersebut yaitu dengan dilakukannya proses audit.

Laporan keuangan yang mencerminkan kondisi dari perusahaan secara sistematis harus melakukan audit terhadap laporan keuangannya. Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2009) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1, menjelaskan tentang laporan keuangan yang ditampilkan oleh perusahaan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi agar laporan keuangan disajikan mempunyai hasil yang relevant dan reliable agar laporan keuangan dapat meyakinkan para pengguna laporan keuangan dan tidak terdapat salah saji material dalam penyusunannya.

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh perusahaan digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelola perusahaan dalam menjalankan usaha. Kegiatan yang dilakukan akan membutuhkan pengeluaran berupa *fee* audit untuk membayar jasa yang dilakukan auditor eksternal. Audit *fee* ditentukan dalam proses tawar-menawar antara pihak stakeholders dengan Kantor Akuntan Publik yang melindungi auditor tersebut serta melihat beberapa faktor (Immanuel & Yuyetta, 2014). SK No. KEP.024/IAPI/VII/2008 yang dikeluarkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) pada tanggal 2 Juli 2008 mengatur tentang Kebijakan Penentuan Audit *fee* pada lampiran 1 menjelaskan mengenai panduan dalam melaksanakan praktik sebagai akuntan publik ketika memutuskan

besaran imbalan yang wajar atas jasa audit yang diberikan kepada setiap klien. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa dalam memutuskan biaya jasa yang sesuai dengan profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang sesuai untuk memberikan jasa dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku.

Kantor Akuntan Publik Indonesia yang terdaftar ada 339 Kantor Akuntan Publik di Otoritas Jasa Keuangan (data OJK, Oktober 2018). Tingkat kompetitif seperti ini maka wajar jika KAP menyuguhkan *fee* terlalu rendah atau *fee discount* untuk mempertahankan kliennya. Ada kondisi dimana audit *fee* menjadi lebih tinggi, untuk menarik minat para pemegang saham, investor, dan kreditor, perusahaan cenderung menjaga agar laporan keuangannya terlihat baik serta menambah keandalan atas laporannya perusahaan harus menggunakan jasa auditor yang independen dan kompeten. Dalam memilih auditor, perusahaan biasanya lebih tertarik dengan auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan tingkat kredibilitas skala internasional yang telah diakui oleh masyarakat umum seperti Big Four walau *fee* yang ditetapkan relatif tinggi.

Struktur dari *corporate governance* terdiri atas dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen serta direktur independen. Pelaksanaan *corporate governance* di dalam perusahaan dapat berhubungan besarnya audit *fee*. Tugas dewan komisaris untuk melaksanakan strategi perusahaan, mengontrol manajemen dalam mengendalikan perusahaan, serta terlaksananya akuntabilitas. Sedangkan Direksi mempunyai tugas yaitu melaksanakan sistem perusahaan sesuai kepentingan dan tujuan perusahaan. Dewan Komisaris bekerjasama dengan direksi dalam menandatangani laporan tahunan perusahaan dengan demikian dewan komisaris memiliki tanggung jawab atas laporan keuangan yang menyesatkan karenanya menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Sehingga memicu komisaris untuk meningkatkan permintaan terhadap audit eksternal sebagai bentuk tanggungjawab kepada pihak shareholders serta melindungi reputasi pribadi, sehingga akan berdampak pada penentuan *fee* audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahab (2011) yang dilakukan di Malaysia menemukan terdapat hubungan positif antara *corporate governance* dan *fee* audit yang berarti semakin baik tata kelola perusahaan semakin tinggi juga *fee* audit yang didapatkan oleh perusahaan. Hasil tersebut dikarenakan *corporate governance* yang baik menginduksi perusahaan untuk mencari auditor yang lebih baik (Abdul wahab, 2011). Dengan kata lain, karena *corporate governance* yang baik akan mendapatkan nilai lebih dari para pemangku kepentingan maka perusahaan lebih memilih jasa audit dengan kualitas yang lebih tinggi dan dengan demikian *fee* audit yang dibebankan akan lebih tinggi.

Dinamika kehidupan ekonomi tidak lepas dari dinamika berpolitik, bahwa ada hubungan simbiosis antara ekonomi dan politik. Pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2019. Erick Tohir pernah menjadi Tim Sukses kampanye Jokowi dan saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN dalam jajaran kabinet Jokowi. Jokowi memilih Erick Tohir karena beliau mempunyai catatan sukses dalam berbagai hal. Dikutip dari Kompas Erick dikenal sebagai sosok pengusaha, pemilik media, dan mempunyai saham di beberapa bisnis olahraga. Suksesnya penyelenggaraan Asian Games, dianggap sebagai kesuksesan Erick Thohir yang duduk sebagai ketua Inasgoc (Lutfia, 2019, Kompas).

Menurut studi terdahulu, hubungan antara perusahaan dengan pihak politisi memiliki dampak yang esensial terhadap *outcome* perusahaan (Gomez dan Jomo, 1997; Gul, 2006). Munculnya hubungan ini adalah kebutuhan bagi kedua belah pihak untuk mencari keuntungan satu sama lain. Penelitian Boubakri, dkk., (2012) menemukan fakta bahwa perusahaan-perusahaan yang terdapat di negara berkembang mempunyai insentif yang kuat dalam menggunakan koneksi politik untuk memperoleh manfaat dari pemerintah sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Negara dengan ekonomi berkembang membangun koneksi politik demi memperoleh keunggulan kompetitif dengan memperoleh akses istimewa atas sumber daya strategis yang hanya dapat diperoleh dengan bantuan para politisi; untuk membina hubungan baik dengan pemerintah sehingga berbagai bentuk

pemaksaan pemerintah dapat dicegah; dan juga untuk mengambil keuntungan dari kelemahan lingkungan institusional (Muttakin, Monem, Khan, & Subramaniam, 2015; You & Du, 2012). Ariningrum & Diyanty (2017) menemukan bukti adanya koneksi politik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap biaya audit. Perusahaan yang terkoneksi politik dianggap mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak terkoneksi politik dan akibatnya auditor akan meningkatkan kinerja yang diminta oleh perusahaan dan akan berdampak pada biaya audit yang tinggi (Wahab, dkk., 2011).

Ketika suatu perusahaan terkoneksi secara politik disamping perusahaan memperoleh keuntungan antara lain pinjaman dari bank, pembayaran pajak yang lebih ringan, juga berpotensi terpapar dampak negatif dari keberadaan koneksi politik itu sendiri seperti aktifitas *tunneling*, proporsi hutang yang tinggi, kinerja keuangan *negative*, dsb.

Koneksi politik yang ada dalam perusahaan akan memberikan pengaruh terhadap *board monitoring*. Kekuatan koneksi politik dalam melakukan kontrol akan menjadi kuat, sehingga *board monitoring* akan menurunkan pengawasannya menyebabkan melemahnya praktek-praktek manajerial yang baik dan menyebabkan buruknya tata kelola perusahaan. Direksi yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, justru melakukan aktivitas yang menguntungkan koneksi politiknya. Hal ini menyebabkan fungsi pengawasan manajemen tidak berjalan efektif (Wulandari, 2018). Kualitas laporan keuangan yang diminta menjadi menurun karena adanya kerjasama antara pihak yang terkoneksi politik dengan para dewan sehingga pihak auditor eksternal tidak dapat mendeteksi kecurangan atau resiko yang ada dalam perusahaan, sehingga pihak auditor membebankan biaya audit yang rendah.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Topik mengenai pengawasan dewan dan *audit fee* merupakan topik yang menarik untuk dikaji. Namun, beberapa penelitian terdahulu mempunyai hasil yang berbeda-beda. Seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus membahas tentang pengaruh pengawasan dewan terhadap *Audit Fee* dengan menambahkan variabel *political connection* (perusahaan yang terkoneksi politik) sebagai keterbaruan dari penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dengan memecah variabel pengawasan dewan menjadi dua variabel yaitu pengawasan komisaris dan direksi. Perubahan variabel tersebut disebabkan pada penelitian sebelumnya dilakukan di negara Amerika Serikat menggunakan sistem *one tier* yang hanya terdapat satu struktur perusahaan, yaitu dewan direksi sebagai pihak yang menjalankan fungsi pengawasan dan pelaksanaan di suatu perusahaan. Namun, pada penelitian ini menyesuaikan dengan kondisi perusahaan di Indonesia yang menggunakan sistem *two tier*, yaitu dewan direksi mempunyai fungsi melaksanakan rencana atau strategi yang telah dibuat oleh perusahaan, sedangkan fungsi pengawasan dilakukan oleh dewan komisaris.

1.3 Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitian atas latar belakang yang telah disampaikan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh pengawasan dewan yang terdiri dari komisaris, direktur, komisaris independen, serta direktur independen terhadap *audit fee* pada perusahaan dengan menghubungkan koneksi politik sebagai moderasi. Diharapkan untuk kemudian hari dapat memberikan manfaat kepada peneliti, akademisi, dan masyarakat luas

1.4 Ringkasan Hasil penelitian :

Berdasarkan hasil pengujian serta analisa yang telah dilakukan terhadap 1,117 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2018, menunjukkan hasil bahwa pengawasan dewan berpengaruh positif terhadap *Audit Fee*. Sedangkan pengawasan dewan serta koneksi politik yang dialami perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Fee*.

1.5 Sistematika Penulisan :

Penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 menjabarkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang berisi dasar penelitian *board monitoring*, *political connection*, dan hubungan terhadap *audit fee*.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 menjabarkan berbagai teori yang mendasari penulisan skripsi ini, penelitian sebelumnya, serta perumusan hipotesis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *signaling theory* dan *audit pricing theory*. Penelitian sebelumnya seputar *board monitoring*, *political connection* dan dampaknya terhadap pengungkapan *audit fee* digunakan penulis sebagai rujukan dalam penulisan skripsi.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab 3 menjabarkan pendekatan penelitian yaitu; variabel penelitian; definisi operasional, pengukuran, dan sumber data variabel; jenis dan sumber data penelitian; prosedur pengambilan data; serta teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan yaitu variabel dependen berupa *audit fee*, variabel independen berupa *board monitoring*, variabel moderasi *political connection*, dan sejumlah variabel kontrol. Data diperoleh dari Orbis tahun 2010-2018 dan IDX tahun 2010-2018 yang diolah menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan *software STATA* versi 14.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab 4 menjabarkan tentang subyek dan obyek penelitian, hasil pengolahan statistik, serta deskripsi hasil pengolahan data. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji korelasi pearson, uji t-test, dan regresi linier berganda. Hasil dari statistik tersebut kemudian dihubungkan dengan teori dan penelitian untuk membuktikan hipotesis penelitian.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 menjabarkan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Pada bagian kesimpulan membahas mengenai gambaran ringkas hasil pengujian hipotesis. Selanjutnya pada bagian saran berisi saran – saran yang diberikan peneliti kepada penelitian selanjutnya untuk memperbaiki keterbatasan dan mengembangkan penelitian saat ini.